



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PASTORAN PAROKI KATEDRAL ST. YOSEPH MAUMERE

Amorius Candra Gunawan^{1*}, Wilhelmina Mitani², Pipiet Niken Aurelia³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia¹²³

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru,

Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

*Penulis Korespondensi: chandragunawan2698@gmail.com

Abstract. Church accountability is essential because it builds the trust of the congregation and upholds stewardship responsibility in managing the resources it receives. This study aims to describe the financial management and the accountability of financial management at the Rectory of St. Joseph Cathedral Parish, Maumere. A descriptive qualitative approach was employed, using primary data obtained through in-depth interviews and observation of the parish priest, the parish treasurer, the parish finance council, and members of the congregation, as well as secondary data in the form of the parish's financial reports. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing, and were validated through source, technique, and time triangulation. The results show that financial management at St. Joseph Cathedral Parish has been carried out through the stages of participatory budget planning, fund collection, transaction recording, and financial supervision and reporting, which are largely consistent with the principles of Financial Accounting Standards Interpretation (ISAK) 35 for non-profit entities. Meanwhile, financial management accountability is realized through horizontal accountability to the congregation, expressed through open disclosure of financial information via weekly announcements, running text, notice boards, and community communication groups, and vertical accountability to the diocese through periodic financial reporting and internal oversight by the parish finance council. These findings imply that strengthening participatory planning and standardized reporting can further reinforce the stewardship-based trust between church administrators and the congregation.

Keywords: Accountability; Church; Financial Management; Nonprofit Organization; Stewardship

Abstrak. Akuntabilitas gereja sangat penting karena dapat membangun kepercayaan umat serta menegaskan tanggung jawab stewardship dalam pengelolaan sumber daya yang telah diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pastoran Paroki Katedral St. Yoseph Maumere. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pastor paroki, bendahara paroki, dewan keuangan paroki, serta umat, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak pengurus gereja berupa laporan keuangan Gereja Katedral St. Yoseph Maumere. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperiksa keabsahannya melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada Paroki Katedral St. Yoseph Maumere telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan anggaran secara partisipatif, penerimaan dana, pencatatan transaksi, serta pengawasan dan pelaporan keuangan yang secara umum telah sejalan dengan prinsip Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 untuk entitas nonlaba. Sementara itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan melalui akuntabilitas horisontal kepada umat, yang tercermin dari keterbukaan informasi keuangan melalui pengumuman mingguan, running text, papan pengumuman, dan grup komunikasi komunitas basis gerejani, serta akuntabilitas vertikal kepada keuskupan melalui pelaporan keuangan periodik dan pengawasan internal oleh dewan keuangan paroki. Temuan ini mengimplikasikan bahwa

penguatan perencanaan partisipatif dan pelaporan yang lebih terstandarisasi dapat semakin memperkuat kepercayaan berbasis stewardship antara pengelola gereja dan umat.

Kata kunci: Akuntabilitas; Gereja; Organisasi Nonlaba; Pengelolaan Keuangan

1. LATAR BELAKANG

Ilmu akuntansi terus mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan agar setiap entitas mampu menyajikan informasi keuangan yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan. Berdasarkan tujuannya, organisasi digolongkan menjadi organisasi laba yang berorientasi pada keuntungan dan organisasi nonlaba yang tidak berorientasi pada pencarian keuntungan (Juniaswati & Murdiansyah, 2022). Gereja merupakan salah satu bentuk entitas nonlaba karena tujuan utamanya adalah menyediakan pelayanan spiritual, sosial, dan keagamaan bagi umat, bukan mencari keuntungan finansial. Sumber dana gereja umumnya berasal dari sumbangan umat dan donatur, sehingga pengelolaan keuangannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dana yang diterima benar-benar digunakan untuk mendukung misi pelayanan gereja.

Akuntabilitas gereja penting untuk membangun kepercayaan umat, menegakkan tanggung jawab stewardship dalam pengelolaan sumber daya, mencegah penyalahgunaan dana dan kekuasaan, serta menegakkan pertanggungjawaban spiritual dalam pelayanan. Namun demikian, masih ditemukan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan gereja, seperti kasus yang menyeret gereja City Harvest di Singapura, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan gereja tidak selalu dijalankan sesuai nilai-nilai Alkitabiah (Wewengkang, 2019). Akuntabilitas sendiri dipahami sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006, dalam Sari et al., 2018), serta kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil kepada pihak terkait (Roberts & Scapens, 1985, dalam Sari et al., 2018).

Krisis akuntabilitas dalam gereja sering kali terjadi terkait pengungkapan informasi keuangan kepada umat, padahal umat merupakan sumber utama dana gereja melalui persembahan dan sumbangan (Gah, 2020). Pengelolaan keuangan gereja yang transparan dan akuntabel mencakup penyusunan laporan keuangan yang jelas dan

berkala, penggunaan dana sesuai tujuan keagamaan dan amal, serta penerapan kontrol internal yang memadai. Salah satu bentuk akuntabilitas organisasi nonlaba adalah penerbitan laporan keuangan, yang melaluinya pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan organisasi dilaksanakan (Wewengkang, 2019). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 merupakan standar khusus pelaporan keuangan bagi entitas nonlaba, termasuk gereja, namun pada praktiknya masih banyak gereja yang belum menggunakan standar baku tersebut dalam menyajikan laporan keuangannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan gambaran yang relatif konsisten mengenai kondisi ini. Andreanto (2021) menemukan bahwa pengelolaan keuangan Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia Persahabatan Surakarta masih sangat sederhana dan belum memiliki pedoman baku, meskipun upaya transparansi kepada umat sudah mulai tampak. A'yun (2022) menemukan hal serupa pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember, yaitu akuntabilitas telah berjalan cukup baik meskipun prosedur pengelolaan keuangannya masih sederhana dan belum mengacu pada ISAK 35.

Gereja Katedral St. Yoseph Maumere merupakan salah satu gereja tua yang terletak di Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang embrionya dibangun oleh Pater Omzight dan diresmikan pada 8 Desember 1873, serta kini berstatus Paroki Katedral yang diumumkan oleh Paus Benediktus XVI pada 14 Desember 2015. Sebagai organisasi keagamaan nonlaba, Paroki Katedral St. Yoseph Maumere membawahi tiga stasi, yaitu Stasi Pusat, Stasi Perumnas, dan Stasi Wairumbia, yang seluruh urusan pengelolaan keuangannya berpusat pada Pastoran Paroki. Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik pada tingkat pastoran akan meningkatkan keyakinan umat dan donatur atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada gereja.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pihak gereja telah menyediakan papan informasi terkait pertanggungjawaban keuangan, namun penyajiannya belum konsisten dilakukan secara berkala. Selain itu, hasil dokumentasi terhadap laporan keuangan gereja menunjukkan bahwa format penyajiannya masih cenderung menggunakan format entitas bisnis, padahal penyajian laporan keuangan entitas nonlaba telah diatur secara khusus dalam ISAK 35. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pastoran

Paroki Katedral St. Yoseph Maumere yang ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi serta akuntabilitas secara vertikal dan horisontal.

2. KAJIAN TEORITIS

Stewardship Theory

Teori stewardship menjelaskan bagaimana pengelola organisasi (steward) membentuk perilaku yang tidak semata-mata memaksimalkan utilitas pribadi, tetapi bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi (Pasoloran & Rahman, 2001). Ketika kepentingan steward dan prinsipal tidak sejalan, steward akan tetap berupaya bekerja sama karena memandang kepentingan bersama sebagai pertimbangan yang lebih rasional dibanding memaksimalkan kepentingan pribadi (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997, dalam Pasoloran & Rahman, 2001). Teori ini berakar pada sikap melayani (stewardship) yang menempatkan pelayanan sebagai landasan penggunaan kekuasaan, menggantikan orientasi kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991, dalam Pasoloran & Rahman, 2001).

Dalam konteks penelitian ini, stewardship theory digunakan untuk memahami bagaimana pastor paroki, bendahara, dan dewan keuangan paroki menjalankan peran sebagai pengelola yang dipercaya oleh umat untuk mengelola dana gereja secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama demi tercapainya tujuan pelayanan gereja dalam jangka panjang.

Akuntabilitas

Secara etimologis, akuntabilitas berasal dari bahasa Latin *accomptare* yang berarti *to account*, dari kata dasar *computare* yang berarti menghitung; dalam bahasa Inggris, *accountability* terdiri atas *account* (laporan atau catatan) dan *ability* (kemampuan), sehingga secara harfiah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kemampuan memberikan pertanggungjawaban melalui penyediaan catatan atau laporan (Sinclair & Amanda, 1995). Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk menjelaskan keputusan dan hasil kepada pihak terkait (Roberts & Scapens, 1985, dalam Sari et al., 2018), sekaligus kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006, dalam Sari et al., 2018).

Mardiasmo (2002) membedakan akuntabilitas menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan, dan akuntabilitas horisontal, yakni pertanggungjawaban organisasi atas amanat yang diterima dan dilaksanakan kepada masyarakat dan lingkungannya. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan mutlak sehingga memperkecil peluang penipuan dan manipulasi, sekaligus memperkuat legitimasi institusi yang wajib melaporkan kepada kelompok tertentu (Trow, 1996, dalam Currie & Huisman, 2004, dikutip oleh Sutjiati, 2010).

Organisasi Nonlaba dan Pelaporan Keuangannya

Organisasi nonlaba adalah organisasi sosial yang didirikan secara sukarela untuk melayani masyarakat tanpa tujuan mencari laba, dengan sumber dana utama berupa sumbangan dari anggota maupun pihak lain tanpa mengharapkan imbalan (Amani, 2021). Karakteristik organisasi nonlaba antara lain menghasilkan barang atau jasa tanpa tujuan laba, bersumber daya utama dari penyumbang, tidak membagikan laba kepada penyumbang, tidak dapat dijual atau dikembalikan sumbangannya, dan berorientasi pelayanan.

Sejak 1 Januari 2020, pelaporan keuangan organisasi nonlaba di Indonesia diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang menggantikan PSAK 45, dengan menempatkan akun aset netto sebagai pengganti ekuitas sesuai karakteristik organisasi nonlaba mengikuti PSAK 1. Berdasarkan ISAK 35, pertanggungjawaban keuangan organisasi nonlaba disajikan melalui laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset netto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Standar ini disusun agar entitas nonlaba, termasuk gereja, dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai karakteristik kelembagaannya.

Pengelolaan Keuangan Gereja

Pengelolaan keuangan gereja mencakup rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang dijalankan oleh pengurus gereja sesuai

struktur hierarki organisasi. Umat perlu mengetahui tahapan pengelolaan keuangan gereja agar dapat mengawasi transparansi penggunaan anggaran serta menjadi dasar penyusunan perencanaan anggaran periode berikutnya. Prinsip-prinsip yang perlu dijalankan dalam pengelolaan keuangan organisasi meliputi transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan partisipatif, yaitu keterlibatan komunitas dalam memberikan kajian, kritik, dan saran terhadap sistem pengelolaan keuangan organisasi.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan pengelolaan keuangan organisasi keagamaan menunjukkan pola temuan yang relatif konsisten. Andreanto (2021) dan A'yun (2022) menemukan bahwa pengelolaan keuangan organisasi keagamaan umumnya masih sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, meskipun upaya transparansi dan pertanggungjawaban kepada umat sudah mulai tampak. Leiwakabessy et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pada gereja-gereja di lingkup Sinode GPM telah sesuai dengan peraturan perbendaharaan gereja dan dijalankan secara akuntabel melalui tahapan perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan.

Resti, Randa, dan Pasoloran (2021) menemukan bahwa akuntabilitas keuangan Gereja Toraja belum sepenuhnya terwujud karena transparansi anggaran dan proses penganggaran yang memadai belum berjalan optimal, sementara Gozali (2021) dan Nurjannah (2018) menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masjid telah dilakukan secara terbuka meski masih sederhana dan belum mengacu pada standar akuntansi organisasi nirlaba. Yanuarisa (2020) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum dan mencerminkan akuntabilitas horisontal kepada gereja dan warga jemaat. Gah (2020) mengungkap tiga dimensi pemaknaan akuntabilitas di GMT Ebenhaezer, yaitu akuntabilitas sebagai kebutuhan, sebagai bentuk keterbukaan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sedangkan Wewengkang (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan gereja didasari nilai-nilai Alkitabiah berupa kasih, pelayanan, dan ketaatan kepada Tuhan. Santoso dan Sugiarti (2014) menemukan bahwa Gereja X di Surabaya telah menerapkan berbagai perspektif akuntabilitas administratif,

legal, politik, profesional, dan moral, meskipun belum memiliki rencana strategis jangka panjang.

Berdasarkan sintesis penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini diposisikan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengelolaan keuangan dan akuntabilitas—baik horisontal maupun vertikal—dijalankan pada organisasi gereja dengan struktur kepengurusan yang berjenjang, yakni pada Pastoran Paroki Katedral St. Yoseph Maumere, yang secara khusus berada di bawah otoritas keuskupan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu proses penelitian yang melibatkan pengajuan pertanyaan dan prosedur penelitian, pengumpulan data yang spesifik dari partisipan, analisis data secara induktif, serta penafsiran makna data (Creswell, 2014, dalam Leiwakabessy et al., 2021). Penelitian dilaksanakan di Pastoran Paroki Katedral St. Yoseph Maumere yang berlokasi di Jalan Mgr. Soegyopranoto Nomor 2, Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Data penelitian terdiri atas data subjek berupa opini, sikap, dan pengalaman informan yang diperoleh melalui wawancara; data fisik berupa objek pengamatan seperti papan informasi keuangan gereja; dan data dokumenter berupa laporan keuangan gereja (Bahri, 2018). Berdasarkan sumbernya, data primer diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan pastor paroki, bendahara paroki, dewan keuangan paroki, dan umat, serta observasi terhadap objek yang berkaitan dengan akuntabilitas gereja, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan yang disediakan oleh pengurus Gereja Katedral St. Yoseph Maumere.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap objek yang berkaitan dengan akses informasi keuangan seperti papan pengumuman; wawancara tatap muka dengan pengurus dan umat gereja; serta dokumentasi terhadap laporan keuangan gereja (Sugiyono, 2018; Bahri, 2018). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1984, dalam Sugiyono, 2018) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data dengan merangkum dan memfokuskan pada hal-hal pokok; penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif; dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dengan mengecek data pada sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, serta triangulasi waktu dengan mempertimbangkan kondisi narasumber pada waktu pengumpulan data agar diperoleh data yang lebih valid dan kredibel (Sugiyono, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paroki Katedral St. Yoseph Maumere merupakan organisasi keagamaan nonlaba yang menaungi tiga stasi, yaitu Stasi Pusat, Stasi Perumnas, dan Stasi Wairumbia, dengan seluruh urusan pelayanan dan pengelolaan keuangan berpusat pada Pastoran Paroki. Struktur kepengurusan pastoral dijalankan secara berjenjang mulai dari Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Paroki hingga Dewan Keuangan Paroki, sesuai mandat hasil Sinode I Keuskupan Maumere. Bendahara paroki bertugas mengelola keuangan paroki berkoordinasi dengan dewan keuangan paroki dan menyusun laporan keuangan bulanan kepada pihak keuskupan.

Pengelolaan Keuangan pada Paroki Katedral St. Yoseph Maumere

Pengelolaan keuangan pada Paroki Katedral St. Yoseph Maumere dilaksanakan melalui sistem yang melibatkan pastor paroki, bendahara paroki, dewan keuangan paroki, serta partisipasi umat, mencakup perencanaan anggaran, penerimaan dana, pencatatan transaksi, hingga pengawasan dan pelaporan keuangan. Dalam aspek perencanaan, paroki telah menerapkan penyusunan anggaran tahunan secara partisipatif, di mana usulan program berasal dari komunitas basis gerejani (KBG), lingkungan, hingga stasi sebelum dibahas bersama dalam rapat Dewan Paroki. Pastor Paroki menjelaskan sebagai berikut.

“Keuskupan kita sudah mulai wajib menerapkan program berbasis anggaran, maka seluruh rancangan itu berdasarkan kebutuhan umat, jadi mulainya dari bawah dari KBG-KBG, lingkungan, dan stasi dan akhirnya kita bersama-sama merancanganya dalam rapat Dewan Paroki.”

Hal tersebut diperkuat oleh Dewan Keuangan Paroki yang berperan membantu pastor paroki menilai kemampuan keuangan paroki serta menentukan prioritas anggaran, sebagaimana dijelaskan berikut.

“Di Paroki Katedral sudah ada penyusunan anggaran tahunan. Biasanya usulan program datang dari KBG, lingkungan, dan stasi. Dewan Keuangan membantu pastor paroki untuk melihat kemampuan keuangan paroki dan menentukan prioritas anggaran.”

Dari sisi penerimaan dana, sumber keuangan paroki berasal dari kolekte mingguan, iuran paroki, donasi umat, kontribusi stasi, serta penerimaan dari kegiatan liturgi seperti misa intensi, misa syukuran, misa arwah, dan misa pemberkatan. Bendahara Paroki menyatakan sebagai berikut.

“Yang pertama itu dari kolekte mingguan, kedua stasi yaitu Stasi Wairumbia dan Stasi Perumnas juga menyeter tiap minggu ke pastoran. Selain itu ada juga kolekte misa syukuran, misa arwah, misa pemberkatan serta iuran paroki dan donasi.”

Pencatatan keuangan menjadi tanggung jawab bendahara paroki dan dilakukan melalui dua sistem, yaitu pencatatan manual pada buku kas harian dan pencatatan digital menggunakan aplikasi akuntansi MYOB, dengan bukti transaksi berupa tanda terima dan dokumen pengeluaran yang diketahui oleh pastor paroki. Bendahara Paroki menjelaskan sebagai berikut.

“Untuk pencatatannya saya lakukan di hari Senin pada saat jam kerja. Saya masukkan dalam buku kas harian supaya bisa dimasukkan lagi ke dalam aplikasi MYOB. Penerimaan dan pengeluaran tersebut ada bukti seperti surat tanda terima dan pengeluaran yang diketahui oleh pastor paroki.”

Pengelolaan keuangan paroki juga menerapkan sistem satu pintu (one gate) dalam pengelolaan arus kas agar seluruh transaksi dapat dipantau oleh pihak keuskupan, dengan batasan kewenangan tertentu untuk penggunaan dana dalam jumlah besar. Pastor Paroki menjelaskan sebagai berikut.

“Kita kan sistemnya one gate (satu pintu). Setiap akhir bulan wajib dari paroki melalui bendahara paroki dilaporkan ke keuskupan. Misalnya di atas 50 juta itu wajib persetujuan uskup dulu baru anggaran atau uang bisa keluar, sedangkan di bawah 50 juta bisa dengan Dewan Keuangan.”

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan paroki tidak bersifat sentralistik, melainkan dijalankan secara partisipatif dengan mempertimbangkan kebutuhan umat, sekaligus mencerminkan prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan organisasi nonlaba. Dalam hal pelaporan, paroki telah

menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran serta laporan posisi keuangan yang disampaikan kepada keuskupan. Meskipun istilah dan format laporan yang digunakan masih mengikuti format laba rugi sebagaimana lazim pada entitas bisnis, secara substansi praktik pencatatan dan pelaporan tersebut telah mencerminkan upaya pertanggungjawaban yang sejalan dengan prinsip dasar Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 bagi entitas nonlaba, yang menekankan pentingnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dari sudut pandang *stewardship theory*, praktik pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh pastor paroki, bendahara, dan dewan keuangan dapat dipahami sebagai wujud tanggung jawab pengelola (*steward*) yang dipercaya umat untuk mengelola sumber daya gereja demi kepentingan bersama, yang ditunjukkan melalui pencatatan yang tertib, penyusunan laporan keuangan, dan mekanisme pengawasan berjenjang. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian A'yun (2022) dan Andreanto (2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan organisasi keagamaan pada umumnya masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti ISAK 35, meskipun praktik transparansi dan pertanggungjawaban kepada umat telah berjalan; serta memperkuat temuan Leiwakabessy et al. (2021), Gozali (2021), dan Gah (2020) mengenai pentingnya sistem pencatatan, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan organisasi keagamaan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Paroki Katedral St. Yoseph Maumere

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Paroki Katedral St. Yoseph Maumere dianalisis melalui dua dimensi utama, yaitu akuntabilitas horisontal kepada umat dan akuntabilitas vertikal kepada keuskupan, yang menunjukkan bagaimana pengelola keuangan paroki mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas Horisontal

Akuntabilitas horisontal diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan kepada umat sebagai pemberi dana sekaligus penerima manfaat pelayanan gereja. Laporan keuangan disampaikan secara terbuka melalui pengumuman pada misa mingguan, *running text* di gereja, papan pengumuman, serta grup WhatsApp komunitas basis gerejani dan lingkungan. Pastor Paroki menjelaskan sebagai berikut.

“Laporan itu bisa rutin setiap minggu melalui pengumuman mingguan, bisa juga triwulan atau enam bulan dalam evaluasi yang disampaikan secara terbuka kepada umat.”

Hal senada disampaikan Bendahara Paroki mengenai ragam sarana komunikasi yang digunakan agar informasi keuangan dapat diakses umat secara luas.

“Yang pertama itu lewat pengumuman pada akhir misa setiap hari Minggu, yang kedua melalui running teks di gereja, dan juga melalui grup WhatsApp KBG dan lingkungan.”

Dari perspektif umat, mekanisme keterbukaan tersebut dinilai sebagai bentuk pengelolaan yang transparan dan terbuka kepada publik, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang umat.

“Keuangan itu secara keseluruhan selalu dilakukan open manajemen atau manajemen terbuka yang diketahui oleh publik dan diumumkan setiap minggu kepada umat.”

Sebelum dipublikasikan, laporan keuangan terlebih dahulu dibahas antara pastor paroki, bendahara, dan dewan keuangan untuk memastikan keakuratan data, sebagaimana dijelaskan Dewan Keuangan Paroki berikut.

“Sebelum laporan keuangan disampaikan kepada umat, biasanya dibahas terlebih dahulu bersama pastor paroki dan bendahara supaya data yang disampaikan sudah benar.”

Mekanisme keterbukaan informasi keuangan tersebut sejalan dengan konsep akuntabilitas horisontal yang dikemukakan Mardiasmo (2002), yaitu kewajiban organisasi mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat atau pihak berkepentingan sebagai wujud transparansi. Proses verifikasi bersama sebelum publikasi juga mencerminkan adanya pengendalian internal yang menjaga keakuratan laporan sebelum disampaikan kepada umat, sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2006) mengenai kewajiban organisasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal diwujudkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan keuangan paroki kepada keuskupan sebagai otoritas gerejawi yang lebih tinggi. Setiap transaksi

dicatat oleh bendahara dan dilaporkan secara rutin dalam bentuk laporan penerimaan-pengeluaran dan laporan posisi keuangan. Bendahara Paroki menjelaskan sebagai berikut.

“Setiap akhir bulan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran harus diserahkan kepada keuskupan dalam bentuk profit and loss dan neraca.”

Pelaporan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan paroki berada dalam sistem pengawasan yang terintegrasi dengan struktur keuskupan, sejalan dengan konsep akuntabilitas vertikal Mardiasmo (2002) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam struktur organisasi. Selain pelaporan kepada keuskupan, pengawasan internal juga dilakukan oleh Dewan Keuangan Paroki yang memeriksa laporan bendahara serta memastikan keabsahan bukti transaksi, sebagaimana dijelaskan berikut.

“Pengawasan dilakukan dengan memeriksa laporan yang dibuat oleh bendahara. Semua penerimaan dan pengeluaran harus ada bukti dan diketahui oleh pastor paroki.”

Mekanisme ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berfungsi pula sebagai instrumen pembatas kekuasaan yang memperkecil peluang penyalahgunaan wewenang, sejalan dengan pandangan Trow (1996, dalam Currie & Huisman, 2004, dikutip oleh Sutjiati, 2010). Dari perspektif stewardship theory, pastor paroki, bendahara, dan dewan keuangan berperan sebagai steward yang bertanggung jawab mengelola dana gereja secara jujur dan transparan, sekaligus menjaga kepercayaan umat melalui pelaporan yang konsisten kepada keuskupan.

Secara keseluruhan, akuntabilitas horisontal kepada umat dan akuntabilitas vertikal kepada keuskupan berjalan secara saling melengkapi dalam mendukung tata kelola keuangan paroki yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan umat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian A'yun (2022) dan Andreanto (2021) yang menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas organisasi keagamaan telah berjalan cukup baik melalui transparansi dan pertanggungjawaban kepada umat meskipun prosedur pengelolaan keuangannya masih sederhana, serta memperkuat temuan Leiwakabessy et al. (2021), Gozali (2021), dan Gah (2020) mengenai pentingnya sistem pencatatan, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan organisasi keagamaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengelolaan keuangan pada Paroki Katedral St. Yoseph Maumere telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan anggaran secara partisipatif yang melibatkan komunitas basis gerejani, lingkungan, dan stasi; penerimaan dana dari kolekte, iuran, donasi, dan kegiatan liturgi; pencatatan transaksi oleh bendahara melalui buku kas harian dan aplikasi akuntansi yang dilengkapi bukti transaksi; serta pengawasan dan pelaporan keuangan secara periodik kepada keuskupan. Secara umum, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip pengelolaan keuangan organisasi nirlaba dan sejalan dengan ketentuan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang menekankan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, meskipun format laporan yang digunakan masih menyerupai format laporan laba rugi entitas bisnis dan belum sepenuhnya mengikuti struktur laporan keuangan yang dianjurkan ISAK 35.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Paroki Katedral St. Yoseph Maumere diwujudkan melalui akuntabilitas horisontal kepada umat, yang tercermin dari keterbukaan informasi keuangan melalui pengumuman mingguan, running text, papan pengumuman, dan grup komunikasi komunitas basis gerejani, serta akuntabilitas vertikal kepada keuskupan melalui penyampaian laporan keuangan secara periodik yang disertai pengawasan internal oleh Dewan Keuangan Paroki. Kedua bentuk akuntabilitas tersebut berjalan saling melengkapi dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan gereja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan umat, sejalan dengan prinsip stewardship theory yang menempatkan pengelola gereja sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber daya demi kepentingan bersama.

Berdasarkan simpulan tersebut, Pastor Paroki Katedral St. Yoseph Maumere disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dengan menyesuaikan format laporan secara lebih lengkap sesuai ISAK 35, agar informasi yang dihasilkan lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan paroki. Bendahara dan dewan keuangan paroki disarankan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan melalui pelatihan atau pendampingan akuntansi organisasi nirlaba agar sistem pencatatan, pengendalian internal, dan penyusunan laporan dapat dilakukan secara lebih profesional dan sistematis. Umat diharapkan dapat terus berpartisipasi aktif mendukung pengelolaan keuangan gereja, baik melalui kontribusi

dana maupun pengawasan penggunaan anggaran, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana gereja. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji lebih mendalam penerapan standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada lembaga keagamaan atau membandingkan praktik pengelolaan keuangan pada beberapa paroki yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai tata kelola keuangan gereja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Bendahara Paroki, Dewan Keuangan Paroki, serta umat Paroki Katedral St. Yoseph Maumere yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa atas dukungan yang diberikan. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pastoran Paroki Katedral St. Yoseph Maumere” di bawah bimbingan Wilhelmina Mitani, S.E., M.Ak., Ak. dan Pipiet Niken Aurelia, S.Ak., M.M., Ak.

DAFTAR REFERENSI

- Ahyaruddin, M., Marlina, E., Azmi, Z., Putri, A. A., Anriv, D. H., Bidin, I., ... Lawita, N. F. (2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan mesjid di Kota Pekanbaru. *Jurnal untuk Mu NegeRI*, 1(1), 7–12.
- Amani, A. (2021). *Akuntansi organisasi nonlaba*. Salemba Empat.
- Andreanto, Y. K. (2021). *Pengelolaan keuangan Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia Persahabatan Surakarta* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Aurelia, P. N., Dilliana, S. M., & Jaro, J. F. (2022). Analisis pelaksanaan sistem pengeluaran kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka. *Accounting Unipa*, 1(2), 12–19.
- A'yun, Q. (2022). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember menurut ISAK 35* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Gah, T. N. (2020). Perwujudan akuntabilitas dalam gereja. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1–12.

- Gozali, Y. Y. (2021). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid* [Skripsi tidak diterbitkan]. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Hadiwijono, H. (1982). *Pengantar teologi*. BPK Gunung Mulia.
- Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiasmara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., ... Muchlis, S. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Media Sains Indonesia.
- Hery. (2017). *Teori akuntansi: Pendekatan konsep dan analisis*. Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Draf eksposur ISAK 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118–135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>
- Kolibu, F. (2018). *Pengertian gereja dan peranannya*. Kanisius.
- Leiwakabessy, T. F., Somba, V. V., & Anakotta, F. M. (2021). Penerapan sistem akuntansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan gereja. *WNCEB*, 1(1), 887–895.
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid. *El Muhasaba*, 13(2), 135–147.
- Mitan, W., Lamawitak, P. L., & Sumiyati, M. F. (2022). Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). *Accounting Unipa*, 1(2), 28–38.
- Nurjannah. (2018). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid: PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori stewardship: Tinjauan konsep dan implikasinya pada akuntabilitas organisasi sektor publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 419–432.
- Resti, R., Randa, F., & Pasoloran, O. (2021). Model akuntabilitas keuangan Gereja Toraja. *Simak*, 19(1), 101–125.
- Santoso, R., & Sugiarti, Y. (2014). Akuntabilitas pada Gereja X di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(2), 1–18.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45–56.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

- Wewengkang, Y. (2019). *Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gereja ditinjau dari aspek keperilakuan pengelola* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Sriwijaya.
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. *Balance*, 12(2), 90–103.